



POLTERA

**RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
POLITEKNIK NEGERI MADURA
REVISI II – TAHUN 2024**



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Politeknik Negeri Madura



RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 POLITEKNIK NEGERI MADURA



RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK NEGERI MADURA
2020 – 2024
REVISI II – TAHUN 2024



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Politeknik Negeri Madura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MADURA

Jalan Raya Camplong km. 4, Taddan, Camplong, Sampang Jawa Timur 69281

Telpon : (0323) 3281671

Laman : www.poltera.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR 718/PL34/PR.00.02/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR 671/PL34/PR.00.02/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA NOMOR 1848/PL34/PR/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI MADURA TAHUN 2020-2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dibutuhkan pedoman pengembangan institusi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan penyusunan Rencana Strategis;
- b. bahwa rencana strategis Politeknik Negeri Madura tahun 2020-2024 harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan revisi/perubahan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madura Tahun 2020-2024 di tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 733661/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura Nomor 671/PL34/PR.00.02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura Nomor 1848/PL34/PR/2020 Tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Madura Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA NOMOR 671/PL34/PR.00.02/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA NOMOR 1848/PL34/PR/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI MADURA TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madura Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Rencana strategis sesuai dengan diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman pengembangan dan penyelenggaraan institusi dalam mendukung ketercapaian visi yang terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan;
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan;
- e. Penutup.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 01 Juli 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Madura (Renstra Poltera) Tahun 2020 – 2024 telah diselesaikan. Renstra Politeknik Negeri Madura 2024 – 2024 ini merupakan dokumen resmi Poltera yang menggariskan dan menentukan arah pengembangan lembaga pada Tahun 2020 – 2024 dan merupakan implementasi Rencana Pengembangan RIP Poltera. Perubahan dalam Revisi Rencana Strategis ini merupakan bentuk penerapan peraturan baru yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Politeknik Negeri Madura.

Revisi II Renstra Poltera Tahun 2020 – 2024 ini telah menjabarkan visi dan misi Politeknik Negeri Madura Sebagai acuan/pedoman pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, dan penyusunan anggaran. Ketercapaian visi operasional Politeknik Negeri Madura akan diukur melalui indikator – indikator yang ditetapkan pada Renstra ini. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Revisi II Renstra Poltera Tahun 2020 – 2024 ini. Akhirnya kami berharap Renstra Politeknik Negeri Madura Tahun 2020 – 2024 ini benar – benar dapat menjadi pedoman dan menyatukan pandangan segenap sivitas akademika Politeknik Negeri Madura dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama menghadapi masa depan.

Sampang, 1 Juli 2024

Direktur,



Laily Ulfiyah, M.T.

NIP. 198608062014042002

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

TIM PENYUSUN RENSTRA
POLITEKNIK NEGERI MADURA
2020 – 2024

M. Musta'in, M.T.
Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
Akhmad Arif Kurdianto S.ST., M.T.
Nurir Rohmah, S.S., M.Ed
Misbakhul Fatah, S.T., M.T.
Aries Alfian Prasetyo, S.Pd., M.Kom.
Annafiyah, S.Si., M.T.
Moh. Jauhari, S.T., M.T.
Jainul Agus Prianto, S.E
Amalia Hufil Fadhillah, S.E.
Sakina Setyowati Putri, S. EI.
Wida Amalia Rosalina, S.Ak.
Kristian Triatmaja Raharja, S.Pd., M.Kes.
Cantika Iva Nugrahani, S.S.T., M.Keb.
Desta Rifky Aldara, S.T., M.T.
Ibrahim Saiful Millah, S.T., M.Sc.
Elisa Christiana, M.Keb.
A Labib Fardany Faisal, M.T.I.
Honesty Pujiyani, M.Tr.Keb.
Qurnia Andayani, Amd.Keb., S.Pd., S.S.T., M.Kes.
Astri Rino Okvitasari, S.S.T., M.Sc.
Nindi Pramesthi Vardila Putri, M.Keb.
Nuraini Fauziah, S.S.T., M.K.M.
Urfiyatul Erifani, A.Md.Kom.
Nurul Huda, A.Md.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR | iv |
| TIM PENYUSUN RENSTRA POLITEKNIK NEGERI MADURA 2020 – 2024 . | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 16 |
| A. Kondisi Umum..... | 16 |
| 1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Madura..... | 16 |
| 2. Penjelasan Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020 – 2024 | 18 |
| 3. Penjelasan Latar Belakang Revisi Renstra dengan Kepmendikbud 3/M/2021 | 21 |
| B. Landasan Hukum..... | 23 |
| C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Poltera 2020-2024 | 25 |
| D. Kondisi Internal | 25 |
| E. Potensi dan Permasalahan..... | 28 |
| BAB II TUJUAN DAN SASARAN | 30 |
| A. Visi | 30 |
| B. Misi | 31 |
| C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan..... | 33 |
| D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | 35 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN | 42 |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi | 42 |
| B. Kerangka Regulasi..... | 44 |
| C. Kerangka Kelembagaan..... | 45 |
| 1. Struktur Organisasi | 45 |
| 2. Tugas dan Fungsi | 46 |
| 3. Reformasi Birokrasi..... | 48 |
| 4. Pengelolaan SDM | 49 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... | 54 |
| A. Target Kinerja..... | 54 |
| 4.1. Kerangka Pendanaan | 71 |
| BAB V PENUTUP | 76 |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| A. | Pedoman Pelaksanaan | 76 |
| B. | Kaidah Pelaksanaan | 77 |
| LAMPIRAN | | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Jenjang Pendidikan Program Studi saat ini | 18 |
| Tabel 1.2. Analisa SWOT | 29 |
| Tabel 2.2 Tujuan Indikator | 33 |
| Tabel 2. 3. Tujuan dan Sasaran..... | 36 |
| Tabel 2. 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | 39 |
| Tabel 2. 1. Misi Politeknik Negeri Madura | 31 |
| Tabel 3. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madura | 42 |
| Tabel 3. 2. Strategi Pengembangan | 43 |
| Tabel 3.4 Kerangka Regulasi | 44 |
| Tabel 4.1 Target Kinerja 2020-2022 (Kepmendikbud 754/P/2020) | 51 |
| Tabel 4.2 Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021) | 53 |
| Tabel 4.2 Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbud 210/M/2023) | 55 |
| 4.4. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021 | 53 |
| Tabel 4.5 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) | 57 |
| Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023 | 57 |
| Tabel 4.6 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021 | 62 |
| Tabel 4.7 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023 | 66 |
| Tabel 4. 8. Kebutuhan Penerimaan/Sumber Daya | 72 |
| Tabel 4. 9. Pengeluaran untuk Indikator Kerja..... | 73 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1. Strategi Pengembangan Poltera 2020 – 2035..... | 20 |
| Gambar 1.2. Milestone Pencapaian VMTS Politeknik Negeri Madura 2012-2032 | 21 |
| Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madura..... | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

KERANGKA REGULASI 80
DEFINISI , KRITERIA DAN FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN 83

DAFTAR ISTILAH

| | |
|----------------------------------|--|
| POLTERA | : Politeknik Negeri Madura |
| PK | : Perjanjian Kinerja |
| IKU | : Indikator Kinerja Utama |
| Renstra | : Rencana Strategis |
| PT | : Perguruan Tinggi |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| PPPK | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| PPNPN | : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
| Tendik | : Tenaga Kependidikan |
| SKS | : Satuan Kredit Semester |
| Kemendikbudristek | : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| IPTK | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| Kopertis | : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta |
| SPP | : Sumbangan Pembinaan Pendidikan |
| BLU | : Badan Layanan Umum |
| PTN-BH | : Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| SIDAKIN | : Sistem Informasi Data dan Kinerja PDDIKTI |
| Pangkalan Data Pendidikan Tinggi | |
| SISTER | : Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi |
| SIKERMA | : Sistem Informasi Kerjasama |
| NIDN | : Nomor Induk Dosen Nasional |
| NIDK | : Nomor Induk Dosen Khusus |
| RKA-K/L | : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
| SAKIP | : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| PKM | : Program Kreativitas Mahasiswa |
| PIMNAS | : Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional |
| MoU | : Memorandum of Understanding |

| | |
|----------|--|
| DUDIKA | : Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja |
| PKS | : Per Kerjasama |
| SMK | : Sekolah Menengah Kejuruan |
| SN-DIKTI | : Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| PRODI | : Program Studi |
| UKT | : Uang Kuliah Tunggal |
| IKK | : Indikator Kinerja Kegiatan |
| UPA | : Unit Penunjang Akademik |
| PNBP | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| RKAT | : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Madura

Cikal bakal Politeknik Negeri Madura adalah Politeknik Madura yang digagas oleh Yayasan Bina Sampang Mandiri (BSM). Atas gagasan dari team pemrakarsa yang diketuai oleh Ir. M. Syaifurrahman Noer, putra H.M. Noer (Alm) mantan gubener Jawa Timur. Hal ini disambut antusias oleh Bupati Sampang saat itu H. Noer Tjahja, dan untuk selanjutnya yayasan BSM bekerja sama dengan pemkab Sampang merealisasikan gagasan tersebut dan sepakat untuk memberi nama Politeknik Madura (POLTERA). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA., memberikan respon yang luar biasa atas permohonan pendirian Politeknik Madura.

Pada kunjungan beliau menyatakan bahwa Politeknik ini langsung menjadi Politeknik Negeri, sehingga namanya berubah menjadi Politeknik Negeri Madura (POLTERA). Ini merupakan bukti keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu dalam mengembangkan pendidikan di wilayah Madura. Pembangunan gedung POLTERA sudah dimulai pada tahun 2012 dengan luas lahan 10 Hektar dengan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2012. Pendirian POLTERA ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas di bidang teknologi kemaritiman, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Poltera merupakan satu satunya perguruan tinggi vokasi di Pulau Madura yang resmi berstatus sebagai perguruan tinggi vokasi negeri sejak 11 November 2012. Sejarah Poltera, pada tahun 2012 hingga awal tahun 2016, melaksanakan kegiatan operasional akademik di Surabaya melalui jalinan kerjasama dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Pada bulan Maret 2016, Poltera menempati gedung

Sejak tahun 2018 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Politeknik Negeri Madura

Nomor 381/269A/AKPER/pend.1/VII/2018 dan Nomor 2743/PL34/KS/2018 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur ke Politeknik Negeri Madura dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 644/KPT/1/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga pada Politeknik Negeri Madura di Kabupaten Sampang. penggabungan akademi keperawatan ini kemudian menjadi salah satu potensi berkembangnya jumlah mahasiswa baru bagi POLTERA, karena minat masyarakat Madura pada pendidikan Kesehatan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelamar Program Studi Keperawatan POLTERA yang cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dengan bergabungnya AKPER ini, POLTERA berupaya untuk menghasilkan lulusan berdaya saing global tidak hanya di bidang keteknikan tetapi juga bidang Kesehatan

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Direktur 1. Kemajuan/perkembangan sejak dinegerikan sampai saat ini tahun 2018 telah dibuka Program studi atau jurusan dan jenjang pendidikan seluruhnya masih D3. Khusus Prodi Keperawatan adalah penggabungan dari Akademi Keperawatan yang ada di Pamekasan Madura sesuai Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 644/KPT/ I/2018 tentang izin pembukaan program studi keperawatan diploma tiga pada Politeknik Negeri Madura tanggal 6 Agustus 2018.

Pada Tahun 2023 Politeknik Negeri Madura melakukan perubahan nomenklatur jurusan hak ini diperlukan untuk merespon perkembangan keilmuan dan tuntutan dunia usaha dunia industri, maka diperlukan perubahan nomenklatur jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Madura. Sesuai dengan Keputusan direktur No. 785/PL34/DV.01.01/2023, disampaikan pada tabel A.1 :

Tabel 1.1. Jenjang Pendidikan Program Studi saat ini

| No. | Eksisting Jurusan | Program Studi | Jenjang |
|-----|-----------------------------|--|---------|
| 1. | Teknologi Elektro | Teknologi Rekayasa | D4 |
| | | Teknik Listrik Industri | D3 |
| | | Tata Operasi dan Perawatan Mesin Listrik | D2 |
| 2. | Rekayasa Mesin dan Industri | Teknik Mesin Alat Berat | D3 |
| 3. | Teknologi Kemaritiman | Teknologi Rekayasa Keselamatan | D4 |
| | | Teknik Bangunan Kapal | D3 |
| | | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi | D2 |
| 4. | Kesehatan | Promosi Kesehatan | D4 |
| | | Keperawatan | D3 |

Program studi adalah pelaksana pendidikan dan pembelajaran yang ada di jurusan serta bertanggung jawab langsung dengan Wadir 1 dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Jurusan. Program Studi dipimpin oleh seorang Koordinatr yang memiliki tugas memimpin pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar.

2. Penjelasan Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020 – 2024

Pendidikan tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terbesar dalam membangun fondasi daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa, cerdas, kreatif, profesional, dan produktif serta menghasilkan temuan dan inovasi baru melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa.

Perguruan tinggi diharapkan berperan penting dalam merekat kehidupan bangsa yang pluralistik sekaligus menjadi kekuatan moral pemersatu bangsa. Apabila perguruan tinggi sehat, mandiri, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional.

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam

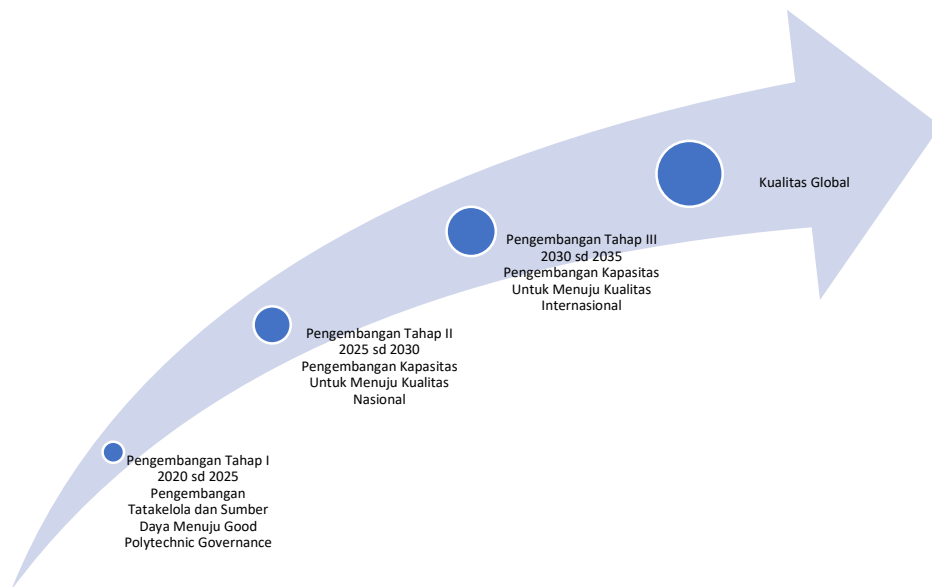
UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Isu strategis pengembangan pendidikan tinggi secara umum meliputi 5 (lima) hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) harus ditingkatkan sebagai respon terhadap perubahan paradigma dalam persaingan era global. Kedua, tata pamong yang baik merujuk pada prinsip-prinsip good university governance (GUG) dengan menjadikan rencana strategis sebagai acuan. Tata pamong yang baik dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan melalui kerja sama dengan industri, melibatkan pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pemerintah pusat dengan tetap berpegang pada norma

dan nilai-nilai akademik. Keempat, pengembangan sumber daya manusia yang merupakan unsur strategis untuk mencapai visi dan misi lembaga. Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting untuk menjaga mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Poltera disusun untuk menghadapi era 2035, rencana tersebut dibagi menjadi 3 tahap besar yaitu Pengembangan Tatakelola dan Sumber Daya Poltera Menuju Good Polytechnic Governance, Pengembangan Kapasitas Poltera Untuk Mencapai Kualitas Nasional, Pengembangan POLTERA Untuk Mencapai Kualitas Internasional. RPJM disusun mulai tahun 2020, penyusunan ini didasarkan pada isu-isu strategis, kondisi Poltera dan arah pengembangan. Isu-isu strategis terkait dengan perkembangan globalisasi dan otonomi pendidikan tinggi. Tahap–tahap RPJM tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar A.2.



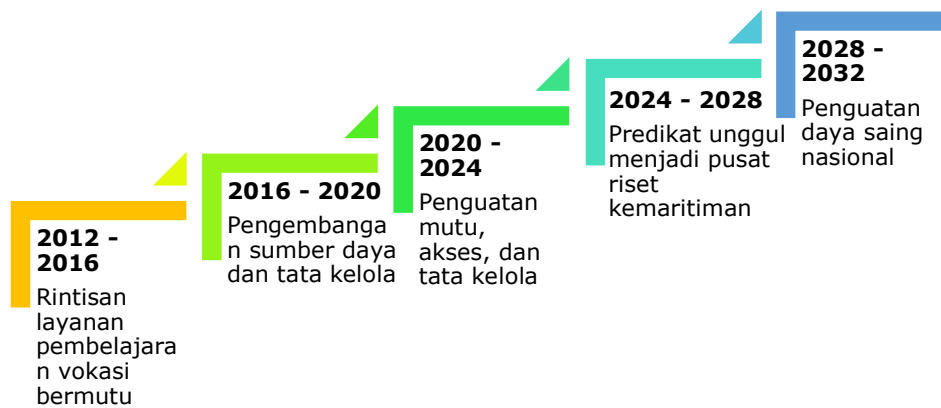
Gambar 1. 1. Strategi Pengembangan Poltera 2020 – 2035

Otonomi pendidikan merupakan isu strategis yang mempengaruhi daya saing antar perguruan tinggi, terutama pada peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini institusi pendidikan yang mempunyai ketersediaan sumber daya lebih diuntungkan. Isu ini dapat mengancam kelangsungan institusi pendidikan yang belum siap, namun juga momentum untuk lebih meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama pada peningkatan daya saing. Berdasarkan RPJM dan Visi dan Misi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini, maka perlu disusun Rencana Strategis Poltera untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Milestone pencapaian VMTS Poltera ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan seluruh Warga Poltera dalam mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Madura melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Setiap tahap berlangsung selama lima tahun dengan sasaran strategis masing – masing yang terus meningkat pada setiap tahapnya.

Milestone pencapaian VMTS Poltera



Gambar 1.2. Milestone Pencapaian VMTS Politeknik Negeri Madura 2012-2032

3. Penjelasan Latar Belakang Revisi Renstra dengan Kepmendikbud 3/M/2021

Pada Revisi Renstra pertama Poltera, indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan penyusunan renstra telah disesuaikan berdasarkan peraturan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. Beberapa penyesuaian tersebut adalah :

- 1) menghilangkan penggunaan kata 'tahun 2020' pada batang tubuh dan lampiran Kepmendikbud;
- 2) mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 2 Lampiran I;

- 3) mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 3 Lampiran II.
- 4) Penjelasan Latar Belakang Revisi Renstra dengan Kepmendikbud 210/M/2023

Pada tahun 2023, terbit Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dipandang :

- 1) perlu dilakukan penyesuaian indikator perhitungan ;
- 2) perlu adanya analisis target dan capaian antara Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023 sebagai baseline penetapan target ;
- 3) perlu adanya penyesuaian PK berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023;
- 4) perlu adanya penyesuaian Rencana Aksi berdasarkan PK yang telah disesuaikan; dan
- 5) perlu adanya penyesuaian Renstra yang berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Hal tersebut, melatar belakangi Renstra Poltera untuk dilakukan Revisi Kedua pada tahun 2023. Penyesuaian peraturan Kepmendikbudristek tersebut guna membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu menyusun indikator kinerja utama pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi

Seiring dengan hal di atas upaya-upaya pengembangan dilakukan dimana dalam Rencana jangka panjangnya Poltera telah mencantumkan visi mencapai daya saing nasional merupakan hal yang realistis untuk dilanjutkan sebagai bentuk kontribusi dan kinerja Poltera terhadap kemajuan bangsa..

Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Madura periode 2020–2024 disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi untuk mempercepat capaian dan menyesuaikan dengan tuntutan masa depan. Salah satu perubahan yang harus disesuaikan adalah perubahan Nomenklatur dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diikuti juga dengan terbitnya Rencana Strategis baru khususnya pada pengembangan kelompok pendidikan vokasi.

Pada tahap renstra ke-2 ini, Politeknik Negeri Madura memasuki era “Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma PT, Kecukupan Kompetensi SDM, dan Optimalisasi Kerjasama” yang sejalan dengan pengembangan renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan, kebijakan dan strategi yang lebih kuat agar dapat eksis dalam era perubahan. Dari sudut pandang yang lain bahwa Politeknik Negeri Madura merupakan lembaga pendidikan milik pemerintah yang juga memiliki fungsi sebagai agen perubahan untuk membawa peserta didiknya menjadi lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan profesional.

Sebagaimana diketahui bahwa Politeknik Negeri Madura merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang harus segera menyejajarkan dirinya dengan perguruan tinggi lainnya. Sampai rentang waktu 2020-2024, Poltera telah memiliki 4 Jurusan dan 9 buah prodi. Pada periode Renstra 2020-2024 direncanakan dan dikembangkan melalui pengembangan jurusan serta pengembangan prodi baru, serta tidak kalah pentingnya adalah strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kerjasama dengan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Sebagai konsekuensi logis untuk mendukung pencapaian pengembangan tersebut, percepatan yang dilakukan Poltera membentuk sebuah *teamwork* yang berfungsi mengoptimalkan peran Struktural Poltera dalam bidang perencanaan dan implementasi programnya. Poltera juga melaksanakan pencapaian sasaran strategis meliputi berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu termasuk sistem penjaminan mutu internal. Serta meningkatkan kemandirian, dalam rangka menuju satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Presiden RI. Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 963).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
9. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 – 2024; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
10. Nomor 67 tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan tata Kerja Politeknik Negeri Madura tanggal 29 Oktober 2012.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesiaa Nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Madura.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 644/KPT/2018, tentang Izin pembukaan program studi Keperawatan Diploma tiga pada Politeknik Negeri Madura di Kabupaten Sampang.
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

14. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura No. 1965/PL34/AK/2019 tentang Pembentukan Jurusan Kesehatan.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Poltera 2020-2024

1) Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Poltera 2020-2024 adalah sebagai:

- a) Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Poltera yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b) Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan
- c) Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

2) Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Poltera 2020-2024 adalah untuk:

- a) mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan- kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga;
- b) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang direalisasikan; dan
- c) mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Poltera dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

D. Kondisi Internal

Analisis internal kelembagaan Politeknik Negeri Madura dikembangkan dari kinerja dan ketercapaian program strategis Renstra Politeknik Negeri Madura 2016-2020 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Relevansi, Kualitas, dan Kapasitas Pembelajaran.
Program strategis ini realisasi ketercapaiannya fluktuatif, namun ada yang realisasinya melampaui target, antara lain jumlah prodi berakreditasi B, sedangkan jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi masih belum tercapai
- 2) Peningkatan Relevansi, Produktivitas Riset, dan Pengembangan
Pencapaiannya program ini rerata realisasinya 80% yang terdiri dari 4 indikator: yaitu Jumlah Publikasi Internasional, Jumlah HKI yang didaftarkan, Jumlah Publikasi Nasional, dan Kinerja Penelitian.
- 3) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan
Rerata realisasi ketercapaian program ini 85%, bahkan terdapat beberapa target yang melampaui target yang ditetapkan seperti Posisi Poltera dalam ranking Perguruan Tinggi Dunia versi WEBBOMETRIC dan jumlah PT baru yang dibina dan dikembangkan.
- 4) Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
Pencapaian dari 4 (empat) target, terealisasi 3 (tiga) target. Terdapat 2 (dua) realisasi yang melampaui target, yaitu efisiensi perencanaan penganggaran, dan indeks kepuasan pelayanan. Target yang realisasinya belum tercapai sesuai target adalah Nilai Laporan Kinerja (yang ditargetkan A, realisasinya BB).
- 5) Peningkatan Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Pendidikan
Realisasi pencapaian program strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator ini, menunjukkan realisasi tren fluktuatif. Terdapat 2 (dua) target yang realisasinya melampaui, yaitu Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S2 dan Jumlah Dosen Berkualifikasi Pendidikan S3, sedangkan 3 target belum mencapai, yaitu Jumlah Dosen Bersertifikat Profesi, Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1, dan Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat fungsional

Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak, dapat menciptakan iklim kerjasama yang menguntungkan seperti *resource sharing*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan pendidikan secara efisien dan efektif, meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan institusi, pemerintah

daerah, lembaga pemerintahan, dan industri juga dapat meningkatkan kualitas dan kesempatan belajar di Poltera, serta meningkatkan eksistensi Poltera di masyarakat luas

E. Potensi dan Permasalahan

Poltera merupakan satu satunya perguruan tinggi vokasi di Pulau Madura yang resmi berstatus sebagai perguruan tinggi vokasi negeri sejak 11 November 2012. Sejarah Poltera, pada tahun 2012 hingga awal tahun 2016, melaksanakan kegiatan operasional akademik di Surabaya melalui jalinan kerjasama dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Pada bulan Maret 2016, Poltera menempati gedung operasional resmi yang berlokasi di Kabupaten Sampang. Sehingga fokus utama Poltera pada Tahun 2015 – 2019 adalah peningkatan Infrastruktur, sarana dan prasarana, dan SDM tanpa mengesampingkan fungsi utama Poltera sebagai perguruan tinggi vokasi. Hal tersebut dibuktikan dengan uraian analisis lingkungan eksternal menunjukkan sejumlah indikator capaian kinerja Poltera melebihi target yang telah direncanakan. Uraian analisis lingkungan eksternal Politeknik Negeri Madura menjadi dasar untuk menentukan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan (*Threat*) sebagaimana yang tercantum pada Tabel analisa SWOT dibawah ini.

Tabel 1.2. Analisa SWOT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Eksternal | OPPORTUNITY (O) | | THREAT (T) | | | |
| | 1. Kebijakan Pemerintah mengembangkan bidang kemaritiman sangat kondusif | | 1. Kebijakan Pemerintah tentang PTV boleh menyelenggarakan PSDKU | | | |
| | 2. Kebijakan bantuan beasiswa dari pemerintah Pusat berbasis akreditasi Prodi dan dari Pemerintah Daerah cukup banyak | | 2. Masuknya Tenaga Kerja Asing di bidang ketrampilan teknik | | | |
| | 3. Tuntutan DUDI terhadap lulusan Politeknik yang memiliki kompetensi yang spesifik | | 3. Masyarakat sekitar belum menempatkan PTV sebagai pilihan utama | | | |
| Internal | 4. Skema pendanaan kompetitif nasional berbasis akreditasi untuk perluasan akses dan penguatan | | 4. Tuntutan revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang semakin kuat | | | |
| | Strength (S) | STRATEGI SO | | STRATEGI ST | | |
| | | 1. Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, serta terdokumentasi dengan baik | 1. Program peningkatan penjaminan mutu yang berkualitas untuk mendukung tercapainya standar dan akreditasi PS dan Institusi unggul (S1,2,3,4,5,6, - O2,4) | | 1. Peningkatan citra PS dan Institusi melalui peningkatan prestasi dan promosi yang lebih inovatif (S4,6 - T1,2,3) | |
| | | 2. Memiliki Tata Kelola dan Tata Pamong yang baik | 2. Pengembangan prodi baru baik D2, D3, dan Sarjana Terapan (S3,4-O1,3,4) | | 2. Kerjasama dengan Pemda di wilayah Madura khususnya Pemda Sampang untuk meningkatkan IPM nya (S2,4, - T3,4) | |
| 3. Memiliki kinerja Tridharma yang baik | | 3. Pengembangan aplikasi yang mendukung pembelajaran dan tata kelola institusi yang efektif dan efisien (S2,4,6-O4) | | 3. Pengembangan aplikasi yang efektif, efisien mudah diakses guna mendukung peningkatan citra institusi (S2,4,5-T1,3,4) | | |
| 4. SDM yang memadai dan mayoritas relatif masih muda | | 4. Pengembangan kurikulum yang adaptif dengan metode pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan (S3,4,6,7O3,4) | | | | |
| 5. Adanya dukungan Sarpras yang memadai | | | | | | |
| 6. Terdapat dukungan praktisi dalam pembelajaran di Program Studi | | | | | | |
| Weakness (W) | STRATEGI WO | | STRATEGI WT | | | |
| | 1. Terdapat Program Studi yang masih memiliki status akreditasi C | 1. Peningkatan kualitas prodi melalui peningkatan nilai akreditasi (W1-O4) | | 1. Pengembangan kapasitas pada program Penerimaan Mahasiswa Baru melalui pilihan jenjang dan PS yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan DUDI (W1,2-T1,4) | | |
| | 2. Peminat pada Program Studi Teknik yang masih relatif rendah | 2. Peningkatan akses melalui kelas Kerjasama yang berkualitas (S5,W2-O3,4) | | 2. Percepatan pengembangan kapasitas dosen untuk merespon perubahan jaman yang semakin cepat(S5,W3-T4) | | |
| 3. Belum ada DT dengan kualifikasi S3 terapan, atau memiliki jabatan LKP dan GB | 3. Pengembangan kapasitas dosen melalui program degree dan non-degree baik dalam dan luar negeri (S5, W3 - O3,4) | | | | | |

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan VISI 2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. Searah dengan Visi Kemdikbud tersebut, maka sebagai subordinat kelembagaan, Politeknik Negeri Madura memprioritaskan kebijakan dan kinerja menjadi Politeknik yang unggul dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing kompetitif dengan berkompentensi yang tinggi. Terkait dengan upaya mewujudkan cita-cita tersebut, dirumuskan Visi (RENSTRA) Politeknik Negeri Madura Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**“Menjadi Politeknik yang unggul di bidang teknologi
kemaritiman dan berdaya saing internasional”**

Jabaran Visi Poltera

1. Unggul bertujuan agar Politeknik Negeri Madura dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang baik, terdidik dan terampil
2. IPTEK dan inovasi merujuk pada keahlian dalam penerapan, penelitian, dan mendukung pengembangan IPTEK kemaritiman yang didukung oleh aspek kelembagaan, sumber daya dan jaringan.
3. Daya saing bangsa merupakan aspek tujuan dimana Poltera dapat berkontribusi dalam perekonomian melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan pendidikan yang menghasilkan lulusan terampil.
4. Internasional menyatakan bahwa tata kelola penyelenggaraan pendidikan harus terakreditasi, unggul, baik nasional maupun internasional, serta kualifikasi lulusan yang unggul, mampu merespon, beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta relevan dengan dinamika kebutuhan pemangku kepentingan (industri, dunia

usaha, masyarakat nasional dan internasional) dengan berkomitmen pada kualitas yang dinamis.

5. Teknologi Kemaritiman merupakan cerminan industri yang ada di Politeknik Negeri Madura yang di dalamnya terdapat jurusan-jurusan yang mendukung industri kemaritiman sesuai dengan geografis Poltera yang terletak di Pulau Madura. Pulau Madura berpotensi besar dengan pelayaran rakyat yang di dukung dengan Jurusan D3 Teknik Bangunan Kapal sebagai industri utama, dan bangunan lepas pantai yang didukung dengan Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Keselamatan. Terdapat pemeliharaan alat berat yang di dukung oleh Jurusan D3 Teknik Mesin dan Alat Berat. Instalasi industri yang di dukung dengan Jurusan D3 Teknik Listrik Industri dan D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Serta Jurusan D3 Keperawatan yang mendukung SDM yang sehat untuk keberlangsungan industri dan keberlangsungan produksi.

B. Misi

Tabel 2. 1. Misi Politeknik Negeri Madura

| Misi Poltera | Penjabaran |
|--|---|
| Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang teknologi kemaritiman yang berkualitas, inovasi, dan berdaya saing internasional; | Upaya dalam perwujudan pendidikan vokasi sebagai sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri kemaritiman secara global dan regional. |
| Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; | Merupakan bentuk kegiatan dan sumber daya penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Madura agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi Poltera berdaya saing, serta menjawab tantangan kebutuhan IPTEK dan terukur dalam <i>time frame</i> tertentu. |
| Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; | Merupakan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan dan penelitian dalam bidang IPTEK kemaritiman dalam upaya memenuhi permintaan dan pemberian solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat serta untuk peningkatan mutu kehidupan bangsa dan seluruh umat manusia sebagai bentuk wujud |

Tabel 2. 1. Misi Politeknik Negeri Madura

| Misi Poltera | Penjabaran |
|--|--|
| | Poltera mampu berdaya saing Internasional. |
| Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tatakelola yang baik; | Merupakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai wujud Poltera mampu menjadi kampus yang berdaya saing internasional dengan sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesinambungan. Dalam konteks ini merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme kerja. Dalam struktur terdapat lembaga-lembaga struktural yang mengkoordinir dan melaksanakan aktifitas akademik, administrasi dan penjaminan mutu, lembaga pendukung akademik. |
| Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan; | Kegiatan suasana akademik seperti interaksi antarmahasiswa, maupun interaksi antardosen mampu mengoptimalkan pembelajaran menunjang lulusan Poltera yang unggul dan berdaya saing internasional, sehingga kondisi dan iklim progres belajar-mengajar kegiatan akademik di Poltera berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Jiwa kewirausahaan merupakan suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. |
| Mengembangkan sistem informasi yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola Poltera | Merupakan sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang menyajikan data dan informasi dari semua unit pengelola tri dharma perguruan tinggi, kerja sama, dan tata kelola di Poltera dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan IPTEK. |

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan yang akan diwujudkan Politeknik Negeri Madura sesuai dengan rumusan misi adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, bermutu dengan kualifikasi yang relevan dan berdaya saing internasional dalam bidang ilmu dan teknologi terapan.
2. Menghasilkan akses layanan pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing;
3. Terciptanya karya ilmiah dan karya pengabdian masyarakat dengan luaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang inovatif melalui penelitian dan pusat studi kemaritiman yang unggul berbasis IPTEKS terapan;
4. Perluasan jaringan kerjasama tridharma sehingga mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;
5. Tercapainya kinerja dan tata kelola institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu sehingga menjamin layanan tridharma yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas dalam rangka mencapai visi dan misi, Politeknik Negeri Madura merumuskan tujuan yang lebih terarah dan operasional. Tujuan yang dituangkan dalam Rencana Strategis selaras dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Madura sebagai perguruan tinggi vokasi.

Berikut adalah tujuan dan indikator kinerja tujuan beserta target keberhasilan 2024 Politeknik Negeri Madura yang tertuang dalam tabel 2.2 .

Tabel 2.2 Tujuan Indikator

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target 2024 |
|-----|---|--|-------------|
| 1 | [T.1] Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | 85% |

| | | | |
|---|---|---|------|
| | berbasis <i>teaching industry</i> | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang | 30% |
| | | menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | |
| 2 | [T.2] Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 30% |
| | | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | 50% |
| | | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | 100% |
| 3 | [T.3] Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan | 100% |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| | kepentingan di bidang akademik dan non akademik | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi | 40% |
| | | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 2,5 |
| 4 | [T.4] Menjadikan Poltera sebagai Institusi yang menerapkan <i>Good Governance</i> | Predikat SAKIP | B |
| | | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L | 94,70 |
| | | Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | 75 |

Dari tabel di atas Indikator Tujuan merupakan indikator keterlaksanaan tujuan sehingga menjadi rumusan sasaran pada renstra ini.

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang telah dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai. Sasaran strategis Politeknik Negeri Madura merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan tujuan yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Tabel 2. 3. Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Sasaran |
|--------|---|
| 1 | Meningkatnya mutu, akses dan relevansi pembelajaran vokasi yang berdaya saing internasional |
| 2 | Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Dosen |
| 3 | Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang di rekognisi nasional dan internasional serta diterapkan di masyarakat |
| 4 | Meningkatnya mutu Kerjasama serta sumber daya pembelajaran yang berbasis keberlanjutan |
| 5 | Meningkatnya pengelolaan Politeknik Negeri Madura yang efektif, efisien dan produktif, melalui pengembangan sistem informasi |

Berdasarkan tabel diatas, penjabaran sasaran strategis Politeknik Negeri Madura dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang 1: Akademik dan Kemahasiswaan

1. Meningkatnya mutu, akses dan relevansi pembelajaran vokasi yang berdaya saing internasional. Sebagai institusi pendidikan milik pemerintah, maka Poltera mempunyai kewajiban yang besar untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kualitas kehidupan. Untuk memenuhi tugas tersebut, maka Poltera berupaya meningkatkan akses dan mutu pembelajaran yang lulusannya dapat diserap oleh pasar kerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi. Serta, pada perjalanannya, POLTERA melakukan updating dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan perluasan akses belajar bagi mahasiswa mengenyam ilmu di luar kampus.

Salah satu tolak ukur kualitas perguruan tinggi adalah daya saing lulusannya dalam pasar kerja. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu memenangkan persaingan pasar kerja, Poltera harus mampu menghasilkan lulusan berkualitas, dengan selalu meningkatkan kualitas dan relevansi program pendidikannya secara berkelanjutan. Lulusan Poltera tidak hanya

dituntut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, namun juga memiliki kemampuan *soft skill* yang berkarater jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan yang memadai. Untuk itu perlu peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan dengan tujuan mendorong perubahan sikap dan mental mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup yang mandiri;

2. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Dosen

Tenaga pendidik atau Dosen juga merupakan bagian penting dalam pembelajaran sehingga POLTERA perlu melakukan percepatan dalam peningkatan kualitas dan kompetensi dosen melalui studi lanjut pada program doctoral serta keikutsertaan dalam kegiatan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidangnya.

3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu indikator keunggulan perguruan tinggi adalah produk ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Kualitas & relevansi hasil penelitian terapan Poltera senantiasa terus menerus ditingkatkan agar produk hasil penelitian tersebut tepat guna dan bermanfaat bagi pengembangan IPTEK dan menjadi solusi aplikatif terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah, swasta dan industry. Salah satu sasaran rencana jangka Panjang dalam bidang ini adalah setting up for Indonesian Maritime Research Center (IMRC) as center of Excellence (CoE);

Bidang 2: Umum dan Keuangan

1. Meningkatnya pengelolaan Politeknik Negeri Madura yang efektif, efisien dan produktif. Untuk menjadi perguruan tinggi yang sehat, Poltera harus dikelola dalam organisasi yang sehat dan professional berlandaskan pelayanan yang efektif, efisien melalui pengembangan system informasi;
2. Revitalisasi dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Prasarana dan sarana adalah salah satu bagian sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi hasil dari proses pendidikan. Dengan demikian, Poltera dituntut untuk

menyediakan kebutuhan akan prasarana dan sarana yang mendorong terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dan institusi secara menyeluruh;

3. Meningkatkan sumber pendanaan secara komprehensif

Peningkatan sumber pendanaan secara komprehensif dimaksudkan untuk dapat mendukung kegiatan manajemen sesuai peta bisnis Poltera. Proses pendanaan yang sistematis, efektif dan efisien harus senantiasa diterapkan dalam setiap pelaksanaan strategi pendanaan.

Bidang 3 : Kerjasama dan Sistem Informasi

1. Meningkatkan mutu Kerjasama serta sumber daya pembelajaran yang berbasis keberlanjutan Dalam rangka mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efisien, sistem informasi merupakan salah satu bidang yang sangat berperan. Dengan sistem informasi, maka proses administrasi, penyimpanan data, monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien sehingga dapat digunakan untuk keperluan manajemen dan tata kelola organisasi;

Sebagai institusi pendidikan, maka Poltera tidak dapat berdiri sendiri dalam memikul tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Poltera harus bekerjasama & bersinergi dengan pemerintah, pengusaha dan industri, masyarakat, maupun institusi pendidikan lainnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan sumber dana maupun fasilitas dan informasi. Disisi lain jaringan kerjasama ini akan sangat berperan dalam usaha untuk meningkatkan posisi maupun citra Poltera di tingkat nasional.

2. Penguatan Jejaring alumni di setiap jurusan

Penguatan jejaring alumni Politeknik Negeri Madura dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dan sinergitas lulusan sehingga lulusan mampu berhasil mengambil peran sebagai agen perubahan di dunia kerja khususnya. Terwujudnya jejaring alumni yang bersinergi juga akan menjadi salah satu indikator keberhasilan Poltera dalam pencapaian visinya. Kuatnya jejaring alumni juga akan memberikan manfaat tidak hanya bagi lulusan, tapi juga civitas akademika Poltera keseluruhan.

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatnya mutu, akses dan relevansi pembelajaran vokasi yang berdaya saing internasional | <p>[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p> <p>IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</p> |
| 2. | Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Dosen | <p>[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</p> <p>[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen</p> |

Tabel 2. 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran |
|----|---|--|
| 3. | Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang di rekognisi nasional dan internasional serta diterapkan di masyarakat | <p>[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p> |
| 4. | Meningkatnya mutu Kerjasama serta sumber daya pembelajaran yang berbasis keberlanjutan | [IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. |
| 5. | Meningkatnya pengelolaan Politeknik Negeri Madura yang efektif, efisien dan produktif, melalui pengembangan sistem informasi | <p>[IKU 4.1] Predikat SAKIP</p> <p>[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</p> <p>[IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama minimal 75</p> |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

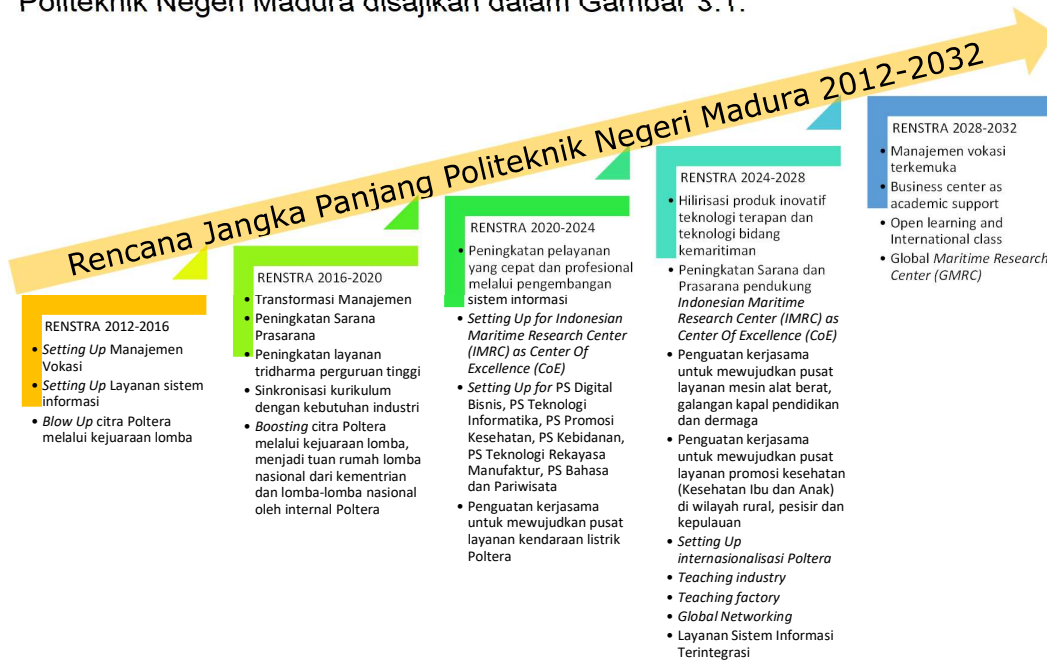
A. Arah Kebijakan dan Strategi

Politeknik Negeri Madura juga menyusun tahapan arah dan kebijakan pengembangan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Negeri Madura selama 12 Tahun sejak 2012 sampai tahun 2032, yang memuat rencana strategis per 5 tahun dengan fokus pada perkembangan kebutuhan Politeknik Negeri Madura dan lingkungan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Politeknik Negeri Madura terbagi dalam 5 Periode adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madura

| Periode | Rencana Strategis | Arah pengembangan dan strategi |
|---------|-------------------|---|
| 1 | 2012-2016 | Rintisan layanan pembelajaran vokasi bermutu |
| 2 | 2016-2020 | Pengembangan sumber daya dan tata kelola |
| 3 | 2020-2024 | Penguatan Mutu, Akses dan Tata Kelola |
| 4 | 2024-2028 | Predikat unggul menjadi pusat riset kemaritiman |
| 5 | 2028-2032 | Penguatan daya saing internasional |

Garis-garis besar arah dan strategi dalam perencanaan jangka panjang Politeknik Negeri Madura disajikan dalam Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Rencana Jangka Panjang Politeknik Negeri Madura 2012-2032

Tabel 3. 2. Strategi Pengembangan

| Periode | Strategi Pengembangan |
|-----------|---|
| 2020-2024 | <p>Penguatan Mutu, Akses dan Tata Kelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program penjaminan mutu yang berkualitas untuk mendukung tercapainya standar dan akreditasi program studi dan institusi hingga menjadi unggul. 2. Mengembangkan Prodi baru baik D2, D3, dan sarjana terapan yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yaitu program studi Digital Bisnis, Teknologi Informatika, Promosi Kesehatan, Kebidanan, Teknologi Rekayasa Manufaktur, Bahasa dan pariwisata untuk mendukung kemaritiman. 3. Mengembangkan aplikasi yang mendukung pembelajaran, tata kelola dan citra institusi yang lebih inovatif, efektif dan efisien. 4. Mengembangkan kurikulum yang adaptif dengan metode pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) untuk mendukung kemaritiman. 6. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah di wilayah Madura khususnya dan Pemerintah daerah secara regional pada umumnya terutama untuk meningkatkan IPM melalui akses pendidikan. 7. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas melalui kerjasama dalam mewujudkan pusat layanan kendaraan listrik Poltera untuk mendukung kemaritiman. 8. Meningkatkan kapasitas dosen melalui program <i>degree</i> terutama dosen berkualifikasi S3, dan program <i>non-degree</i> terkait sertifikasi pendukung di bidang kemaritiman baik di dalam dan luar negeri. 9. Melakukan pengembangan Pusat Penelitian Maritim Indonesia / <i>Indonesian Maritime Research Center (IMRC)</i> sebagai <i>Center of Excellent</i> melalui keterlibatan civitas akademika Poltera dalam mendukung kebijakan kemaritiman Indonesia. |
| 2024-2028 | <p>Predikat unggul menjadi pusat riset kemaritiman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas melalui kerjasama dunia usaha dan dunia industry di dalam dan di luar negeri dalam kegiatan <i>teaching industry</i> dan <i>teaching factory</i> di bidang kemaritiman. 2. Meningkatkan kapasitas dosen melalui program <i>degree</i> dan <i>non-degree</i> baik dalam dan luar negeri terutama dosen berkualifikasi S3. 3. Melakukan pengembangan Pusat Layanan Mesin Alat Berat, Galangan kapal Pendidikan dan dermaga. |

Tabel 3. 2. Strategi Pengembangan

| Periode | Strategi Pengembangan |
|-----------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang mendukung pembelajaran, tata kelola dan citra institusi yang lebih inovatif, efektif dan efisien. 5. Melakukan pengembangan Pusat Layanan Promosi Kesehatan (Kesehatan Ibu dan Anak) di daerah rural, pesisir dan kepulauan. 6. Mengembangkan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi di luar negeri yang berbasis kemaritiman. 7. Mempercepat pengembangan Pusat Penelitian Maritim Indonesia / <i>Indonesian Maritime Research Center (IMRC)</i> sebagai <i>Center of Excellent</i> melalui penguatan sarana dan prasarana pendukung. |
| 2028-2032 | <p>Penguatan daya saing internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan program penjaminan mutu yang berkualitas dan sertifikasi internasional (ISO) untuk mendukung Poltera menuju manajemen vokasi terkemuka. 2. Memperkuat pengembangan Pusat Penelitian Maritim Indonesia / <i>Indonesian Maritime Research Center (IMRC)</i> sebagai <i>Center of Excellent</i> menjadi Pusat Penelitian Unggul. 3. Penguatan kapasitas dosen melalui program <i>degree</i> baik dalam dan luar negeri terutama dosen berkualifikasi S3 dan <i>non-degree</i> di luar negeri dalam mendukung <i>international class</i>. 4. Mengintegrasikan sistem pembelajaran inovatif yang mendukung open learning untuk penerimaan mahasiswa asing 5. Membangun pusat bisnis berbasis kemaritiman untuk mendukung penguatan pengelolaan keuangan dan pengembangan institusi. |

B. Kerangka Regulasi

Dalam menjalankan Renstra Politeknik Negeri Madura 2020 - 2024, proses tata kelola dan pelaksanaan bisnis di Poltera mengacu pada regulasi-regulasi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan.

Regulasi tersebut meliputi:

Tabel 3.4 Kerangka Regulasi

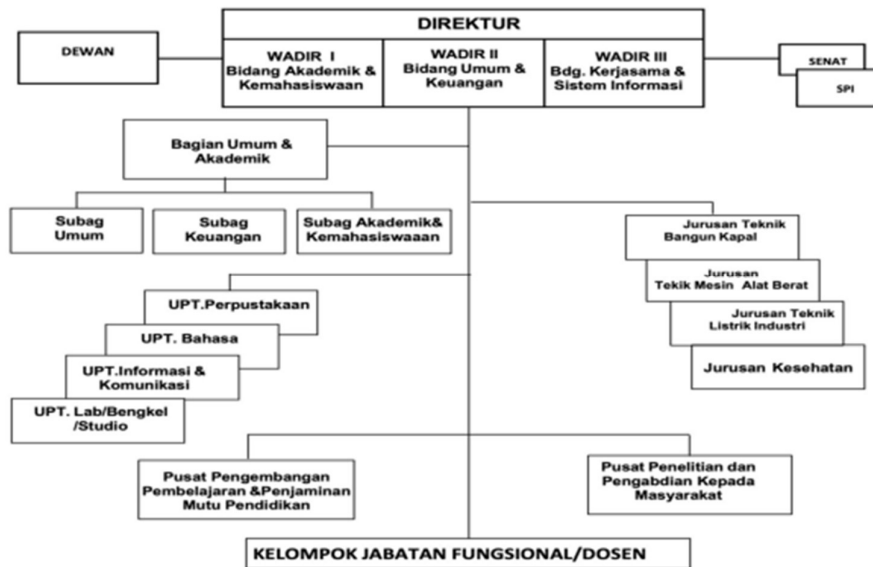
| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian | Target Penyelesaian |
|----|--|--|---------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|---|--|------|
| 1 | Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan teknologi tentang besaran tarif UKT dan luran Pembangunan Institusi | Penetapan UKT dan IPI untuk Mahasiswa Baru tahun Akademik 2024/2025 | 2024 |
| 2 | Kepmendikbud No.754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 | Definisi operasional dan parameter penghitungan capaian IKU Tahun 2020 | 2020 |
| 3 | keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 / m / 2021 | indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan dan kebudayaan | 2021 |
| 4 | Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang Keputusan Menteri No. 210/M/2023 | indikator kinerja utama yang pada pokoknya berisi tentang Indkator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2023 |
| 5 | Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 | Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura | 2023 |

C. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka mencapai visi misi dan strategi Poltera seperti yang dijelaskan diatas maka harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang bertujuan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi yang tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Statuta Poltera.



Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madura

2. Tugas dan Fungsi

Politeknik Negeri Madura mempunyai Tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus, yaitu menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan:

- 1) Pendidikan, antara lain program pendidikan vokasi, membuat kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), administrasi akademik, bahasa pengantar, dan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Penelitian, antara lain program penelitian, keterlibatan dosen dan mahasiswa, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian;

- 3) Pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lain tata cara penyelenggaraan, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pembinaan dan pengembangan sivitas akademika;
- 5) Etika akademik/kode etik, memuat etika akademik/kode etik yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Madura;
- 6) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan memuat penjabaran tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pemberian gelar dan penghargaan memuat tentang gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan Pemberian penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang non-akademik;
- 8) Pelayanan administrasi tata kelola perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Madura.

Politeknik Negeri Madura sebagai Perguruan Tinggi Vokasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Politeknik Negeri Madura dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi diharuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur:

- 1) Penyusun kebijakan;

- 2) Pelaksana akademik;
- 3) Pengawas dan penjaminan mutu;
- 4) Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- 5) Pelaksana administrasi atau tata usaha.

Politeknik Negeri Madura mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan BAB III pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67/2012 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura yaitu:

- a) Direktur dan Wakil Direktur;
- b) Bagian Umum dan Akademik;
- c) Jurusan;
- d) Pusat; dan
- e) Unit Pelaksana Teknis.

Seluruh struktur organ memiliki uraian tugas dan kewenangan masing-masing dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, obyektif dan kredibel.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat Rencana Kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Pada bulan Mei tahun 2019.

Poltera telah melaksanakan pembimbingan pembangunan zona integritas oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Pembangunan zona integritas dimaksud untuk memenuhi Program Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dengan indikator Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM dan Nilai PMPRB Kemendikbud

4. Pengelolaan SDM

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Sistem pengelolaan sumber daya manusia di Poltera, baik itu untuk Dosen maupun Tenaga Kependidikan (ASN dan Non-ASN) mengacu pada aturan kepegawaian tingkat Nasional, karena Poltera merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satker di bawah Kemendikbud. Perencanaan kebutuhan pegawai, baik itu Dosen maupun Tenaga Kependidikan di Poltera telah dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini sebagai pengaplikasian perencanaan sumber daya manusia pada jangka menengah, selain perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan formasi penerimaan pegawai sebagai capaian dari perencanaan dilakukan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: KEP75/M.PAN/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban kerja jalur CPNS dan non- CPNS yang dihitung berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Perencanaan dalam

penyusunan formasi pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan analisa jabatan (analisa jabatan);
2. Memperkirakan persediaan pegawai;
3. Menghitung kebutuhan pegawai;
4. Menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan

Hasil penghitungan usulan pegawai tersebut kemudian dituangkan pada dokumen dan diusulkan ke Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara khusus Poltera memiliki pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia yang tercantum dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Maksud disusunnya standar dosen dan tenaga kependidikan di Poltera adalah sebagai petunjuk praktis tentang tata cara standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya. Luas lingkup standar dosen dan tenaga kependidikan di poltera meliputi:

1. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
 - a. Direktur/Wakil Direktur Akademik membentuk Tim Ad-Hoc yang diwakili oleh minimal 3 (tiga) orang dari masing-masing program studi (Kajur dan dua orang dosen). Tim ini melakukan studi terhadap seluruh ketentuan normatif berupa peraturan Perundang-undangan (Standar Nasional Pendidikan) yang mengatur tentang kompetensi lulusan.
 - b. Mengidentifikasi kategori kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan dan menyelaraskan dengan Visi Misi Institusi dan Visi Keilmuan Program Studi.
 - c. Menetapkan kompetensi umum dan kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh lulusan.
 - d. Melakukan verifikasi standar kompetensi lulusan yang telah disepakati dan memastikan bahwa semua kompetensi tersebut sudah ada di kurikulum.

- e. Senat mengesahkan dokumen standar kompetensi lulusan yang telah disusun tersebut dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir.
 - f. Direktur menandatangani Lembar Pengesahan dan Surat Keputusan dokumen tersebut.
2. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
 - a. Direktur Poltera/Wadir Akademik dan Kemahasiswaan/Wadir bidang Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan kabag umum dan kepegawaian tentang perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 - b. Direktur Poltera/ Wadir Akademik dan Kemahasiswaan, Kaprodi untuk menyusun beban kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
 - c. Direktur Poltera/Wadir bidang Umum dan Keuangan melakukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai dalam menentukan formasi dan jumlah kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan.
 3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar dosen dan tenaga kependidikan
 - a. Kabag umum dan kepegawaian beserta Kajur melakukan monitoring terhadap kinerja dosen berdasarkan beban kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. Wadir bidang umum dan keuangan melakukan evaluasi terhadap kemampuan dosen dan tenaga kependidikan yang sudah diterima di Poltera.
 - c. Kabag umum dan kepegawaian melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan terhadap hasil analisis jabatan dan kebutuhan pegawai.
 - d. Wadir bidang keuangan bersama Kabag umum dan kepegawaian beserta Kajur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perekrutan, pembebanan, dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
 4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar dosen dan tenaga kependidikan

- a. Kabag umum dan kepegawaian melakukan pengendalian atas segala bentuk penyimpangan terhadap pencapaian standar Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada analisis jabatan dan kebutuhan pegawai.
 - b. Kajur melakukan pengendalian terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sesuai dengan beban kinerja yang telah ditetapkan.
 - c. Wadir bidang Umum dan keuangan melakukan pengendalian terhadap kualitas dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan pelaksanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan setelah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
5. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
- a. Kajur melakukan rekam kinerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan beban kerja yang sudah ditentukan.
 - b. Kabag umum dan kepegawaian melakukan rekam kinerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai.
 - c. Wadir bidang umum dan keuangan melakukan rekam kinerja dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan proses rekrutmen yang dilaksanakan.
 - d. Wadir bidang umum dan keuangan, Kabag umum dan kepegawaian, dan Kajur melakukan komparasi dari rekam kinerja yang dilaksanakan untuk mengsusulkan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan yang baru

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Madura, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Politeknik Negeri Madura melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada periode 2020 – 2022, Politeknik Negeri Madura menggunakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Pada periode 2022-2023, Politeknik Negeri Madura melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. Dan pada periode 2024, Politeknik Negeri Madura menyesuaikan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor 210/M/2023.

Berikut Indikator Kinerja Utama dan target Politeknik Negeri Madura pada periode 2020 – 2022 sesuai Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 sebagai berikut

Tabel 4.1 Target Kinerja 2020-2022 (Kepmendikbud 754/P/2020)

| Indikator Kinerja Utama | | | Baseline Triwulan III 2020 | Target | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|--------|------|
| | | | | 2021 | 2022 |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | Mendapat pekerjaan | 55% | 55% | 55% |
| | | Melanjutkan studi | | | |
| | | Menjadi wiraswasta | | | |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | Menghabiskan paling idak 20 sks di luar kampus | 10% | 10% | 15% |
| | | Meraih prestasi tingkat Nasional | | | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | Di kampus lain di QS 100 (by subject) | 15 % | 15% | 15% |
| | | Bekerja sebagai praktisi di dunia industri | | | |
| | | Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional | | | |
| IKU 2.2 | | Berkualifikasi S3 | 30% | 30% | 30% |

Rencana Strategis 2020 – 2024

| | | | | | |
|---------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| | <p>Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> | <p>Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja</p> | | | |
| | | <p>Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja</p> | | | |
| IKU 2.3 | <p>Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.</p> | <p>Rekognisi Internasional</p> | <p>0,1</p> | <p>0,1</p> | <p>0,1</p> |
| | | <p>Diterapkan oleh masyarakat</p> | | | |
| IKU 3.1 | <p>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> | | <p>35%</p> | <p>35%</p> | <p>35%</p> |
| IKU 3.2 | <p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p> | <p>Pembelajaran pemecahan Kasus</p> | <p>35%</p> | <p>35%</p> | <p>35%</p> |
| | | <p>Project Based Learning</p> | | | |
| IKU 3.3 | <p>Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah</p> | | <p>2,5%</p> | <p>2,5%</p> | <p>2,5%</p> |
| IKU 4.1 | <p>Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB</p> | | <p>BB</p> | <p>BB</p> | <p>BB</p> |
| IKU 4.2 | <p>Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93</p> | | <p>93</p> | <p>93,5</p> | <p>93</p> |

Tabel 4.2 Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021)

| Indikator Kinerja Utama | | | Baseline | Target | |
|-------------------------|--|--|----------|--------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | Mendapat pekerjaan | 55% | 55% | 60% |
| | | Melanjutkan studi | | | |
| | | Menjadi wiraswasta | | | |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus | 10% | 10% | 30% |
| | | Meraih prestasi tingkat nasional | | | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | Di kampus lain di QS 100 (by subject) | 15% | 15% | 30% |
| | | Bekerja sebagai praktisi di dunia industri | | | |
| | | Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional | | | |
| IKU 2.2 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | Berkualifikasi S3 | 30% | 30% | 50% |
| | | Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja | | | |
| | | Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja | | | |

Rencana Strategis 2020 – 2024

| | | | | | |
|---------|---|------------------------------|------|------|--------|
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | Rekognisi Internasional | 0,1 | 0,1 | 100 |
| | | Diterapkan oleh masyarakat | | | |
| IKU 3.1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | | 35% | 35% | 100% |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | Pembelajaran pemecahan Kasus | 35% | 35% | 40% |
| | | Project Based Learning | | | |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah | | 2,5% | 2,5% | 2,5 |
| IKU 4.1 | Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB | | BB | BB | B B |
| IKU 4.2 | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | | 93,5 | 93 | 94 |

Tabel 4.2 Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbud 210/M/2023)

| Indikator Kinerja Utama | | Baseline 2023 | Target |
|-------------------------|--|--|--------|
| | | | 2024 |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | Memiliki pekerjaan | 85% |
| | | Melanjutkan studi | |
| | | Menjadi wiraswasta | |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. | Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi | 30 % |
| | | Meraih prestasi | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. | Tridharma (di PT Lain) | 30 |
| | | Praktisi (Pengalaman Praktisi) | |
| | | Membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi | |
| IKU 2.2 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri. | Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri | 50 |
| | | Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | |

Rencana Strategis 2020 – 2024

| | | | | |
|---------|---|---|------|------|
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | Karya tulis ilmiah | 100 | 100 |
| | | Karya terapan | | |
| | | Karya seni | | |
| IKU 3.1 | Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. | | 100% | 100% |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi. | Pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) | 40 | 40 |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. | | 2,5 | 2,5 |
| IKU 4.1 | Predikat SAKIP | | BB | BB |
| IKU 4.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | | 94 | 94,7 |
| IKU 4.3 | Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | | - | 75 |

Berdasarkan tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas, terdapat tiga matriks yang berbeda, karena adanya perubahan nomenklatur IKU pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi. Adanya perbedaan nomenklatur IKU tersebut, terdapat perbedaan Baseline dalam penentuan target IKU Poltera. Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madura Tahun 2020 – 2021 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020. Pada Tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Politeknik Negeri Madura berada di bawah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menerapkan 8 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola, sehingga baseline yang digunakan adalah baseline capaian Tahun 2021 untuk menentukan Target 2022 dan Target 2023. Sedangkan pada tahun 2023 menggunakan nomenklatur IKU terbaru sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Poltera menerapkan 8 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola dan tambahan 1 IKU Tata kelola baru tentang indikator penilaian zona integritas. Pada peraturan tersebut telah diatur bahwa target untuk setiap indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan adalah Target Standart Emas, dijelaskan pula bahwa penghitungan data capaian tahun 2023 tidak lagi menggunakan penghitungan manual. Penghitungan data capaian tahun 2023 telah menggunakan aplikasi SIDAKIN yang mengumpulkan data dari beberapa aplikasi dan parameter waktu yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Utama seperti aplikasi *tracer study*, PD Dikti, SISTER dan SIKERMA.

Beberapa perubahan definisi operasional dan formula Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki pembobotan dan kriteria untuk masing – masing indikator. Seperti pada IKU 1.2 sesuai peraturan Nomor 3/M/2021 IKU 1 yang diukur adalah “**Lulusan**”, sedangkan pada peraturan Nomor 210/M/2023 IKU 1 dijelaskan lebih detail “**Outcome lulusan untuk pekerjaan/kewiraswastaan dibobotkan sesuai matriks**”. Pada IKU 2 yang sebelumnya “**Prestasi mahasiswa hanya ditingkat Nasional**”, pada peraturan terbaru “**Prestasi diperluas s.d Tingkat provinsi**”. Pada IKU 3 yang sebelumnya “**Menghitung kegiatan dosen berNIDN dan NIDK**” sedangkan pada peraturan terbaru “**Hanya menghitung kegiatan dosen berNIDN**”. Pada IKU 4 yang sebelumnya memiliki kriteria “**Dosen berkualifikasi S3**” pada peraturan terbaru peraturan tersebut dihapus. Pada IKU 6 adanya “Pengakuan terhadap program studi yang sudah melakukan kegiatan kerjasama lebih dari 1 kali” sedangkan pada peraturan sebelumnya tidak ada.

4.4. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021

| Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja | | Satuan | Baseline 2021 | Target | | |
|---|-------------------|--|--------|---------------|--------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran | | | | | | | |
| IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. | | | % | 30 | 35 | 40 | 50 |
| a. Berkualifikasi S3 | IK-01 | Persentase dosen berkualifikasi Doktor | % | 2 | 3 | 4 | 6 |
| b. Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja | | | % | 15 | 18 | 21 | 28 |
| c. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja | IK-02 | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja di industri atau Lembaga profesi minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun | % | 13 | 14 | 15 | 16 |
| IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | | | % | 35 | 37 | 38 | 40 |
| a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) | | | % | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 |
| b. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) | | | % | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 |
| | IK-03 | Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proiek (team-based project) | % | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------|-----|-----|------|-----|
| | IK-04 | Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran | Prodi | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | IK-05 | Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja | Prodi | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Program Prioritas 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | | | | |
| IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | | | % | 15 | 20 | 22,5 | 25 |
| a. Berkegiatan tridarma di kampus lain di QS 100 (berdasarkan ilmu) | IK-06 | Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain | Judul (Nominal) | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau | | | % | 6 | 6 | 7 | 8 |
| c. Membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | | | % | 4 | 8 | 9 | 10 |
| IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | | | Judul | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| a. Rekognisi Internasional | | | | 0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| b. Diterapkan oleh masyarakat | | | | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| | IK-07 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional | Judul (Nominal) | 17 | 20 | 22 | 25 |
| | IK-08 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi | Judul (Nominal) | 35 | 40 | 45 | 50 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------|------|------|------|------|
| | IK-09 | Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri | Judul (Nominal) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | IK-10 | Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltera dan diterbitkan oleh Poltera dengan pembaca skala Nasional | Judul (Nominal) | 7 | 15 | 20 | 25 |
| Program Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar | | | | | | | |
| IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah | | | % | 0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| | IK-11 | Akreditasi Institusi minimal | Peringkat | B | Baik | Baik | Baik |
| | IK-12 | Persentase Akreditasi Program | % | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | IK-13 | Jumlah program studi terakreditasi Internasional | Prodi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB | | | Predikat | B | BB | A | A |
| | IK-14 | Nilai Implementasi SAKIP | Predikat | B | BB | A | A |
| IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | | | Nilai | 93,5 | 94 | 95 | 96 |
| | IK-15 | Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran | Nilai | 93,5 | 94 | 95 | 96 |
| Program Prioritas 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni | | | | | | | |
| IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | | | % | 55 | 57 | 58 | 60 |
| a. Mendapatkan pekerjaan | IK-16 | Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan | % | 40 | 40,5 | 40,8 | 41,5 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|------|------|------|------|
| b. Melanjutkan Studi | IK-17 | Jumlah lulusan yang studi lanjut | % | 10 | 11 | 11,2 | 12 |
| c. Menjadi wiraswasta | IK-18 | Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha | % | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| IKU 1.2 Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | | | % | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
| a. Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus | | | % | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| | IK-19 | Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka | Prodi | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | IK-20 | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar | Orang | 6 | 7 | 8 | 10 |
| b. Meraih prestasi minimal tingkat nasional | | | % | 6 | 6,5 | 6,7 | 7 |
| | IK-21 | Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional | Orang | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | IK-22 | Jumlah capaian perolehan | Judul | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri | | | | | | | |
| IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | | | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK-23 | Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun | MoU | 14 | 16 | 18 | 20 |
| | IK-24 | Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri | MoU | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | IK-25 | Income generate yang dihasilkan dari kerjasama | PKS | 3 | 4 | 6 | 8 |

**Tabel 4.5 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)
Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023**

| Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Satuan | Baseline 2023 | Target | | | |
|--|-------------------|--|------------------|--------|------|------|----|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran | | | | | | | |
| IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | | % | 50 | 35 | 50 | 50 | |
| a. Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri:atau | IK-01 | Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU | % | 40 | 30 | 40 | 45 |
| b. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja | IK-02 | Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran. | % | 2 | 1 | 2 | 2 |
| IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi | | % | 40 | 37 | 40 | 40 | |
| a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) | | % | 20 | 18 | 20 | 20 | |
| b. Pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) | | % | 20 | 15 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | IK-03 | Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) | % | 15 | 13 | 15 | 15 |
| | IK-04 | Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran | % | 18 | 12 | 18 | 18 |
| | IK-05 | Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja | % | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Program Prioritas 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | | | | |
| IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | | | % | 30 | 20 | 30 | 30 |
| a. Berkegiatan tridharma di kampus lain | IK-06 | Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain | Judul (Nomina) | 6 | 5 | 6 | 6 |
| b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau | | | % | 8 | 7 | 8 | 8 |
| c. Membimbing mahasiswa berkegiatan diluar prodi | | | % | 10 | 8 | 10 | 10 |
| IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | | | Judul | 100 | 60 | 100 | 100 |
| a. Rekognisi Internasional | | | | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| b. Diterapkan oleh masyarakat | | | | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-----------------|-------|------|-------|-------|
| | IK-07 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional | Judul (Nominal) | 30 | 20 | 30 | 30 |
| | IK-08 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi | Judul (Nominal) | 50 | 40 | 50 | 50 |
| | IK-09 | Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri | Judul (Nominal) | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | IK-10 | Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltera dan diterbitkan oleh Poltera dengan pembaca skala Nasional | Judul (Nominal) | 25 | 15 | 25 | 25 |
| Program Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri | | | | | | | |
| IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | | | % | 0% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| | IK-11 | Akreditasi Institusi minimal | Peringkat | B | Baik | Baik | Baik |
| | IK-12 | Persentase Akreditasi Program | % | 9 | 8 | 9 | 9 |
| | IK-13 | Jumlah program studi terakreditasi Internasional | Prodi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKU 4.1 Predikat SAKIP A | | | Predikat | A | BB | A | A |
| | IK-14 | Nilai Implementasi SAKIP | Predikat | A | BB | A | A |
| IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | | | Nilai | 96,17 | 94 | 96,16 | 96,17 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-------|-----|-------|-------|
| | IK-15 | Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran | Nilai | 96,17 | 94 | 96,16 | 96,17 |
| IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | | | Nilai | 75 | 0 | 0 | 75 |
| | IK-16 | Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor | Nilai | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Program Prioritas 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni | | | | | | | |
| IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | | | % | 60 | 57 | 60 | 79,26 |
| a. Mendapatkan pekerjaan | IK-17 | Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan | % | 41,5 | 40 | 41,5 | 41,5 |
| b. Melanjutkan Studi | IK-18 | Persentase jumlah lulusan yang studi lanjut dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah lulus | % | 12 | 11 | 12 | 12 |
| c. Menjadi wiraswasta | IK-19 | Persentase jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam rentang waktu 1 (satu) tahun | % | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi | | | % | 30 | 11 | 30 | 30 |
| c. Menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi | | | % | 6 | 4,5 | 6 | 6 |
| | IK-20 | Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka | Prodi | 6 | 4 | 6 | 6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|-------|------|------|------|------|
| | IK-21 | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar | Orang | 12 | 7 | 12 | 12 |
| d. Meraih prestasi pada kompetisi mulai tingkat provinsi sampai internasional | | | % | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
| | IK-22 | Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional | Orang | 30 | 25 | 30 | 30 |
| | IK-23 | Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS | Judul | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri | | | | | | | |
| IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | | | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | IK-24 | Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun | MoU | 20 | 16 | 20 | 20 |
| | IK-25 | Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri | MoU | 9 | 7 | 9 | 9 |
| | IK-26 | Income generate yang dihasilkan dari kerjasama | PKS | 8 | 6 | 8 | 8 |

Tabel 4.6 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbud Nomor 3/M/2021

| Indikator Kinerja Utama | | Indikator Kinerja | | Kegiatan Pendukung [5 Pilar] | |
|-------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|--|
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | IK-16 | Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan | K-01 | Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima |
| | | | | K-02 | Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi |
| | | | | K-03 | Peningkatan indeks kepuasan |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---|-------|---|
| | | IK-17 | Jumlah lulusan yang studi lanjut | K-04 | Pengembangan <i>Job Placement Center</i> (JPC) Poltera untuk Mahasiswa dan Alumni |
| | | | | K-05 | Keterlibatan alumni pada kegiatan di Poltera |
| | | IK-18 | Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha | K-06 | Pengembangan ketrampilan wirausaha |
| | | IKU 1.2 | Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. | IK-19 | Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka |
| IK-20 | Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar | | | K-08 | Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar |
| | | | | K-09 | Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun |
| IK-21 | Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional | | | K-10 | Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti |
| IK-22 | Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS | | | K-11 | Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja | IK-06 | Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain | K-12 | Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject |
| | | | | K-13 | Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|
| sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. | | | | K-14 | Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa |
| | | | | K-15 | Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen |
| | | | | K-16 | Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja |
| | | | | K-17 | Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset |
| | | | | K-18 | Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional |
| | | | | K-19 | Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA |
| | | | | K-20 | Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri Poltera |
| | | | | K-21 | Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun |

| | | | | | |
|---------|--|-------|--|------|---|
| | | | | K-22 | Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang |
| | | | | K-23 | Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga |
| | | | | | Internasional atau Perguruan Tinggi |
| | | IK-25 | Income generate yang dihasilkan dari kerjasama | K-24 | Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi | IK-03 | Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) | K-25 | Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik |
| | | | | K-26 | Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran |
| | | IK-04 | Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran | K-27 | Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4 |
| | | IK-05 | Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja | K-28 | Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track |
| K-29 | Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4 | | | | |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 | IK-11 | Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali | K-30 | Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI |

| | | | | | |
|---------|---|-------|---|------|--|
| | dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah | IK-12 | Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali | K-31 | Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan |
| | | IK-13 | Jumlah program studi terakreditasi Internasional | K-32 | Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional |
| IKU 4.1 | Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB | IK-14 | Nilai Implementasi SAKIP | K-33 | Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional Poltera |
| IKU 4.2 | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan | IK-15 | Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit | K-34 | Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset |

Tabel 4.7 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023

| Indikator Kinerja Utama | | Indikator Kinerja | | Kegiatan Pendukung [5 Pilar] | |
|-------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|---|
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. | IK-16 | Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan | K-01 | Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima |
| | | | | K-02 | Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi |
| | | | | K-03 | Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan |
| | | IK-17 | Jumlah lulusan yang studi lanjut | K-04 | Pengembangan <i>Job Placement Center</i> (JPC) Poltera untuk Mahasiswa dan Alumni |
| | | K-05 | Keterlibatan alumni pada kegiatan di Poltera | | |

| | | | | | |
|---------|---|-------|---|------|---|
| | | IK-18 | Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha | K-06 | Pengembangan ketrampilan wirausaha |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi | IK-19 | Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka | K-07 | Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka |
| | | IK-20 | Jumlah Lulusan yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar | K-08 | Peningkatan kualitas kegiatan <u>Merdeka Belajar</u> |
| | | | | K-09 | Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun |
| | | IK-21 | Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional | K-10 | Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti |
| | | IK-22 | Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS | K-11 | Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | IK-06 | Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain | K-12 | Peningkatan Reputasi Akademik |
| | | | | K-13 | Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri |
| | | | | K-14 | Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi |
| IKU 2.2 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang | IK-01 | Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU | K-15 | Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen |

Rencana Strategis 2020 – 2024

| | | | | | |
|---------|--|-------|--|------|--|
| | diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | IK-02 | Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran. | K-16 | Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja |
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. | IK-07 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di <u>jurnal Internasional</u> | K-17 | Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset |
| | | IK-08 | Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi | K-18 | Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan |
| | | IK-09 | Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan <u>nvata di industri</u> | K-19 | Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA |
| | | IK-10 | Jumlah buku/modul yang ditulis dosen Poltera dan diterbitkan oleh Poltera dengan pembaca skala Nasional | K-20 | Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri Poltera |
| IKU 3.1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. | IK-23 | Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun | K-21 | Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun |
| | | | | K-22 | Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang |

| | | | | | |
|---------|---|-------|--|------|---|
| | | IK-24 | Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri | K-23 | Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri |
| | | IK-25 | Income generate yang dihasilkan dari kerjasama | K-24 | Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-IUKT |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. | IK-03 | Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) | K-25 | Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik |
| | | | | K-26 | Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran |
| | | IK-04 | Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran | K-27 | Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4 |
| | | IK-05 | Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja | K-28 | Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track |
| K-29 | Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4 | | | | |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki | IK-11 | Akreditasi Institusi minimal | K-30 | Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI |
| | | IK-12 | Persentase Akreditasi Program | K-31 | Peningkatan Penjaminan Mutu |

Rencana Strategis 2020 – 2024

| | | | | | |
|---------|---|-------|--|------|--|
| | akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui | IK-13 | Jumlah program studi terakreditasi Internasional | K-32 | Peningkatan Kualitas Prodi |
| IKU 4.1 | Predikat SAKIP | IK-14 | Nilai Implementasi SAKIP | K-33 | Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional Poltera |
| IKU 4.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas | IK-15 | Nilai Indeks Kinerja dan | K-34 | Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset |
| IKU 4.3 | Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | IK-16 | Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | K-35 | Peningkatan kualitas tata kelola Zona Integritas |

4.1. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program kerja yang tertuang dalam indikator kinerja yang sudah direncanakan, dibutuhkan sumber daya berupa pendanaan yang cukup. Poltera menargetkan pendanaan yang berasal dari beberapa sumber diantara Rupiah Murni - Rutin, Rupiah Murni BOPTN, Penerimaan Negara Bukan Pajak – PNBP, dan Surat Berharga Syariah Negara – SBSN. Komponen Rupiah Murni – Rutin terdiri atas Gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Komponen Rupiah Murni – BOPTN terdiri atas dukungan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Matching fund (MF) serta Competitif Fund (CF). Tahun 2022 Poltera mendapat dana MF akan tetapi tidak masuk ke pagu anggaran Poltera karena masih ikut di pagu anggaran Kementrian. Mulai tahun 2023 MF sudah masuk pagu anggaran Poltera. Komponen Surat Berharga syariah Negara (SBSN) meliputi sarana dan prasaranan. Komponen Penerimaan Hibah Dalam Negeri (PNBP) terdiri atas penelitian, pengabdian masyarakat dan dukungan layanan pembelajaran.

Adapun detail sumber daya atau penerimaan dana yang direncanakan diuraikan lebih rinci pada Tabel 4.4. dan detail kebutuhan pengeluaran untuk semua indikator kinerja yang telah direncanakan diuraikan pada Tabel 4.5

Tabel 4. 8. Kebutuhan Penerimaan/Sumber Daya

| No | Kerangka Pendanaan | Satuan | Pendanaan | | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Rupiah Murni - Rutin | Rp | 7,405,821,000 | 9,580,975,000 | 10,329,064,000 | 10,365,970,000 | 10,884,268,500 | 48,566,098,500 |
| 2 | Rupiah Murni - BOPTN Non Penelitian | Rp | 4,283,916,000 | 4,641,927,000 | 4,641,927,000 | 4,841,367,000 | 5,083,435,350 | 23,492,572,350 |
| 3 | Rupiah Murni - BOPTN Penelitian | Rp | - | - | - | 1,977,860,202 | 2,076,753,212 | 4,054,613,414 |
| 4 | Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBPN | Rp | 6,434,306,000 | 5,282,298,000 | 5,357,482,000 | 6,351,500,000 | 6,257,938,000 | 29,683,524,000 |
| 5 | Surat Berharga Syariah Negara - SBSN | Rp | 61,688,935,000 | - | - | - | - | 61,688,935,000 |
| Jumlah | | Rp | 79,812,978,000 | 19,505,200,000 | 20,328,473,000 | 23,536,697,202 | 24,302,395,062 | 167,485,743,264 |

Tabel 4. 9. Pengeluaran untuk Indikator Kerja

| No | Sasaran Kinerja | Pagu 2020 | Pagu 2021 | Pagu 2022 | Pagu 2023 |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 2.227.712.000 | 1.971.173.000 | 2.555.863.000 | 1.957.981.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 3.358.033.000 | 4.076.062.000 | 3.817.542.000 | 7.565.694.000 |
| 3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 66.665.180.000 | 3.681.490.000 | 3.626.087.000 | 4.782.743.000 |
| 4 | Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | 7.405.821.000 | 9.580.975.000 | 10.329.064.000 | 11.586.814.000 |
| | Jumlah | 79.656.746.000 | 19.505.200.000 | 20.328.556.000 | 25.893.232.000 |

| No | Sasaran Kinerja | Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024 |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | 1.712.965.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | 1.965.865.000 |
| 3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | 8.889.655.000 |
| 4 | Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | 12.562.554.000 |
| | Jumlah | 25.131.039.000 |

Justifikasi penentuan kenaikan anggaran diperoleh dari

1. Rupiah Murni – Rutin

Kenaikan anggaran setiap tahun terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan operasional dan penambahan ASN baik PNS maupun PPPK.

2. Rupiah Murni – BOPTN Non Penelitian

Kenaikan anggaran dialokasikan oleh Biro Perencanaan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bisa dari kemampuan menyerap anggaran BOPTN di tahun-tahun sebelumnya, jumlah mahasiswa, dan ajuan perhitungan kebutuhan BOPTN setiap tahunnya.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penambahan jumlah program studi baru yang berimplikasi pada penambahan kuota Maba sehingga berdampak pada kenaikan/peningkatan PNBP setiap tahunnya.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V

PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Madura tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen resmi yang memuat *road map* yang ingin dicapai Politeknik Negeri Madura selama lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2024. Komitmen dari pimpinan dan segenap sivitas akademika Poltera adalah faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan program dan pencapaian target indikator kinerja Renstra yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dimonitoring dan dievaluasi serta diukur dengan akurat. Renstra ini juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemanfaatan anggaran dalam peningkatan kualitas outcome dan output dan Renstra ini adalah dokumen perencanaan yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan di lingkungan Politeknik Negeri Madura.

Dengan telah disusunnya Renstra ini tidak berarti bahwa apa yang dicita-citakan dalam periode lima tahun mendatang sudah pasti dapat diwujudkan, tetapi Renstra ini hanya memuat hal-hal yang secara strategis ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Madura dan bagaimana cara mencapainya. Untuk itu pimpinan Politeknik Negeri Madura harus mampu mengerahkan semua potensi yang dimilikinya untuk menjalankan Renstra ini, termasuk dalam hal penyediaan dana baik yang berasal dari pemerintah, dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

Renstra Poltera tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan prediksi/asumsi kondisi lima tahun ke depan, jika terjadi perubahan lingkungan internal dan eksternal di luar prediksi, (adanya pandemik atau resesi) sehingga Renstra ini menghadapi kendala besar untuk diimplementasikan dan mencapai indikator target rencananya, maka dapat dilakukan perubahan Renstra atas inisiatif pimpinan Politeknik Negeri Madura menyesuaikan dengan kondisi pada saat tersebut. Perubahan arah kebijakan dan/atau target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat dilakukan hanya jika ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya dan/atau tuntutan peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Senat Politeknik Negeri Madura

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam menyusun Renstra Politeknik Negeri Madura 2020-2024, tujuan utama adalah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta memperkuat posisi Politeknik sebagai lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai hal tersebut, berbagai strategi dan program telah dirumuskan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

Renstra ini memberikan arah secara garis besar bagi Politeknik Negeri Madura sehingga terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah dan bangsa. Berikut adalah beberapa poin penting yang kami tekankan dalam penutup Renstra ini:

1. Penguatan Mutu Tri Dharma

Dalam hal pendidikan Politeknik Negeri Madura akan terus meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi yang diselenggarakan. Instansi akan terus berupaya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, mengadopsi metode pembelajaran yang inovatif, dan meningkatkan kualifikasi dosen dan tenaga pendidik lainnya. Dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat instansi akan mendorong dan mendukung kegiatan riset dan pengembangan di bidang maritim dan pendukungnya sebagaimana yang telah menjadi keunggulan Politeknik Negeri Madura. Kolaborasi dengan industri dan institusi terkait akan ditingkatkan untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Penguatan Akses

Politeknik Negeri Madura akan terus mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan riset. Pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi prioritas untuk menjamin kualitas dan efektivitas kegiatan akademik.

3. Penguatan Tata Kelola

Politeknik Negeri Madura akan terus meningkatkan tata kelola dan manajemen organisasi. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Perlu adanya komitmen untuk menjalankan Renstra ini dengan penuh dedikasi dan integritas. Karena dengan hal tersebut implementasi strategi dan program-program yang telah dirumuskan akan berjalan dengan lancar sehingga dapat mengantarkan Politeknik Negeri Madura menjadi lembaga pendidikan vokasi yang berdaya saing dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kami berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh sivitas akademika, mitra industri, serta pemerintah dan masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Bersama-sama, kita akan meraih prestasi dan kemajuan yang lebih baik di masa depan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN KERANGKA REGULASI

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian | Target Penyelesaian |
|----|---|---|---------------------|
| 1 | Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang besaran tarif UKT dan luran Pembangunan Institusi | Penetapan UKT dan IPI untuk Mahasiswa Baru tahun Akademik 2024/2025 | 2024 |
| 2 | Kepmendikbud No.754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 | Definisi operasional dan parameter penghitungan capaian IKU Tahun 2020 | 2020 |
| 3 | keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 / m / 2021 | indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan dan kebudayaan | 2021 |
| 4 | Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang Keputusan Menteri No. 210/M/2023 | indikator kinerja utama yang pada pokoknya berisi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | 2023 |
| 5 | Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2023 | Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura | 2023 |

Lampiran : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kepmen 754/P/2020

| Program/ Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | PIC |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | | | | | | | | | |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | 3.810.415.000 | 3.718.391.319 | 4.175.687.000 | 3.913.398.250 | 3.957.285.000 | 3.895.607.315 | 3.973.909.000 | 3.894.476.637 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | 355.465.000 | 299.741.073 | 199.220.000 | 180.565.000 | 473.982.000 | 450.809.367 | 712.356.000 | 662.964.839 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| SK.2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | | | | | | | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | 137.291.000 | 135.829.100 | 95.761.000 | 93.211.000 | 107.246.000 | 105.395.690 | 54.021.000 | 48.360.400 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 2.2 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | 196.385.000 | 113.625.890 | 221.520.000 | 217.053.000 | 88.750.000 | 86.569.144 | 63.830.000 | 63.830.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | 439.989.000 | 431.829.573 | 614.969.000 | 600.003.100 | 486.677.000 | 468.504.803 | 3.138.662.000 | 3.052.663.781 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | | |
| IKU 3.1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | 45.193.000 | 38.010.000 | 56.029.000 | 54.823.000 | 150.583.000 | 138.810.696 | 88.550.000 | 87.682.000 | Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | 65.264.216.000 | 64.289.021.721 | 2.893.320.000 | 2.818.000.000 | 3.063.672.000 | 3.004.510.115 | 4.327.290.000 | 4.034.118.782 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah | 290.131.000 | 286.016.029 | 231.880.000 | 228.779.000 | 150.622.000 | 139.481.348 | 124.154.000 | 112.813.800 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.4 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | | | | | | | | | |
| IKU 4.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | 1.711.840.000 | 1.062.734.929 | 1.435.839.000 | 1.415.574.000 | 1.520.675.000 | 1.388.400.758 | 1.823.646.000 | 1.754.228.934 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| IKU 4.2 | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | 7.405.821.000 | 7.347.130.000 | 9.580.975.000 | 8.736.078.853 | 10.329.064.000 | 10.177.839.255 | 11.586.814.000 | 11.394.584.423 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |

Kepmen 3/M/2021

| Program/ Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | PIC |
|----------------------|---|---------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Atokasi | Realisasi | Atokasi | Realisasi | Atokasi | Realisasi | Atokasi | Realisasi | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | | | | | | | | | |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | - | - | 4.175.687.000 | 3.913.398.250 | 3.957.285.000 | 3.895.607.315 | 3.973.909.000 | 3.894.476.637 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | - | - | 199.220.000 | 180.565.000 | 473.982.000 | 450.809.367 | 712.356.000 | 662.964.839 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| SK.2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | | | | | | | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir | - | - | 95.761.000 | 93.211.000 | 107.246.000 | 105.395.690 | 54.021.000 | 48.360.400 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 2.2 | Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja | - | - | 221.520.000 | 217.053.000 | 88.750.000 | 86.569.144 | 63.830.000 | 63.830.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen | - | - | 614.969.000 | 600.003.100 | 486.677.000 | 468.504.803 | 3.138.662.000 | 3.052.663.781 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | | |
| IKU 3.1 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra | - | - | 56.029.000 | 54.823.000 | 150.583.000 | 138.810.696 | 88.550.000 | 87.682.000 | Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | - | - | 2.893.320.000 | 2.818.000.000 | 3.063.672.000 | 3.004.510.115 | 4.327.290.000 | 4.034.118.782 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah | - | - | 231.880.000 | 228.779.000 | 150.622.000 | 139.481.348 | 124.154.000 | 112.813.800 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.4 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | | | | | | | | | |
| IKU 4.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | - | - | 1.435.839.000 | 1.415.574.000 | 1.520.675.000 | 1.388.400.758 | 1.823.646.000 | 1.754.228.934 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| IKU 4.2 | Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 | - | - | 9.580.975.000 | 8.736.078.853 | 10.329.064.000 | 10.177.839.255 | 11.586.814.000 | 11.394.584.423 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |

Kepmen 210/M/2023

| Program/ Kegiatan | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | PIC |
|----------------------|---|---------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKU 1.1 | Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | - | - | 4.175.687.000 | 3.913.398.250 | 3.957.285.000 | 3.895.607.315 | 3.973.909.000 | 3.894.476.637 | 4.245.324.000 | 4.245.324.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 1.2 | Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi ;atau meraih prestasi | - | - | 199.220.000 | 180.565.000 | 473.982.000 | 450.809.367 | 712.356.000 | 662.964.839 | 736.000.000 | 736.000.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| SK.2 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKU 2.1 | Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | - | - | 95.761.000 | 93.211.000 | 107.246.000 | 105.395.690 | 54.021.000 | 48.360.400 | 57.132.000 | 57.132.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 2.2 | Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | - | - | 221.520.000 | 217.053.000 | 88.750.000 | 86.569.144 | 63.830.000 | 63.830.000 | 149.673.000 | 149.673.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| IKU 2.3 | Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen | - | - | 614.969.000 | 600.003.100 | 486.677.000 | 468.504.803 | 3.138.662.000 | 3.052.663.781 | 2.762.870.000 | 2.762.870.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | | | | | | | | | | | |
| IKU 3.1 | Jumlah kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | - | - | 56.029.000 | 54.823.000 | 150.583.000 | 138.810.696 | 88.550.000 | 87.682.000 | 74.200.000 | 74.200.000 | Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.2 | Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | - | - | 2.893.320.000 | 2.818.000.000 | 3.063.672.000 | 3.004.510.115 | 4.327.290.000 | 4.034.118.782 | 10.291.312.000 | 10.291.312.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi |
| IKU 3.3 | Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | - | - | 231.880.000 | 228.779.000 | 150.622.000 | 139.481.348 | 124.154.000 | 112.813.800 | 151.162.000 | 151.162.000 | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| SK.4 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | | | | | | | | | | | |
| IKU 4.1 | Predikat SAKIP | - | - | 1.435.839.000 | 1.415.574.000 | 1.520.675.000 | 1.388.400.758 | 1.823.646.000 | 1.754.228.934 | 1.057.615.000 | 1.057.615.000 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| IKU 4.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | - | - | 9.580.975.000 | 8.736.078.853 | 10.329.064.000 | 10.177.839.255 | 11.586.814.000 | 11.394.584.423 | 8.735.099.000 | 8.735.099.000 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
| IKU 4.3 | Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minila 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.000.000 | 114.000.000 | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |

DEFINISI , KRITERIA DAN FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN

(KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/M/2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI)

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|--|--|
| 1. | Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta. | <p>a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekedaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup compang) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) 2) pekerja lepas (<i>freelancer</i>). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p> | Tracer Study Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|--|----------------------|
| 2. | <p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau</p> <p>b. meraih prestasi.</p> | <p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2.</p> <p>Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersamasama dengan mahasiswa lain. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, | PPDIKTI, SIMKATMAW A |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|-------------------|--|-------------|
| | | <p>pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/ atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria Prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <p>a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi</p> <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p> | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|--|-----------------|
| | | <p>b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n}k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$ <p>a1=jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a2=jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a3=jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p>b=jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c=jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x=jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y= total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k=konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p> | |
| 3. | <p>Dosen di luar kampus:</p> <p>Persentase dosen yang <input type="checkbox"/> berkegiatan tridharma di <input type="checkbox"/> perguruan tinggi lain, bekerja <input type="checkbox"/> sebagai praktisi di dunia <input type="checkbox"/> industri, atau membimbing <input type="checkbox"/> mahasiswa berkegiatan di</p> | <p>a. Syarat pelaporan ke Pimpinan perguruan tinggi</p> <p>1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;</p> <p>2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</p> <p>3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</p> | SISTER, PPDIKTI |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|----------------------|--|-------------|
| | luar□ program studi. | <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menj adi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintahan; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendir (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|--|---|-----------------|
| | | <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau Lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ol style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi 3) Mendampingi mahasiswa membangun produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat; 4) Membimbing mahasiswa untuk Sertifikasi kompetensi internasional. <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di Perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p> | |
| 4. | <p>Kuafikasi dosen/pengajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, du | <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; | SISTER, PPDIKTI |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|---|-------------|
| | nia □ usaha, atau dunia industri. | <p>b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintahan; atau h) BUMN/BUMD.</p> <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</p> <p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar.</p> <p>Formula: $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p> | |
| 5. | Kualifikasi Dosen: Dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3 | Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. | SISTER |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|--|-------------|
| 6. | <p>Penerapan karya dosen:</p> <p>Jumlah keluaran dosen yang <input type="checkbox"/>berhasil mendapat rekognisi <input type="checkbox"/>internasional atau diterapkan <input type="checkbox"/>oleh masyarakat/industri/<input type="checkbox"/>pemerintah per jumlah dosen.</p> | <p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat / industri / pemerintah :</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) Iaporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: Modernisasi seni tari daerah). <p>Formula:</p> $\frac{\sum_i^t n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industry/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industry/pemerintah atas karya)</p> | SISTER |
| 7. | Kemitraan program studi: | <p>a. Kriteria kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); | SIKERMA |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|---|-------------|
| | <p>Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.</p> | <p>2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau 10)melakukan kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS 200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10)rumah sakit; 11)UMKM; 12)lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13)lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.</p> <p>Formula: $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4 /D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 danD4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p> | |
| 8. | <p>Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan</p> | <p>a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> | PPDIKTI |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|---|--|-------------|
| | <p>metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> | <p>a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i>: a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari I (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan <i>project</i> dan dunia usaha industri.</p> <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas /(<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team based project)</i>.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p> | |
| 9. | <p>Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi</p> | <p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula: $\frac{n}{t} \times 100$</p> | PPDIKTI |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|---|----|----|--------------------|---|---|----|----|-------------------|---|-----|-----|----|---|---|-----|------|----|-----------------------------|----|----|----|-----|--|
| | internasional yang diakui pemerintah | n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kai) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Predikat SAKIP: Predikat SAKIP BB | <p>Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komponen terdiri dari: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sub-komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. <p>LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="516 1163 1323 1568"> <thead> <tr> <th data-bbox="516 1163 716 1283">Komponen</th> <th data-bbox="716 1163 873 1283">Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th data-bbox="873 1163 1031 1283">Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th data-bbox="1031 1163 1182 1283">Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> <th data-bbox="1182 1163 1323 1283">Total Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="516 1283 716 1346">Perencanaan Kinerja</td> <td data-bbox="716 1283 873 1346">6</td> <td data-bbox="873 1283 1031 1346">9</td> <td data-bbox="1031 1283 1182 1346">15</td> <td data-bbox="1182 1283 1323 1346">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1346 716 1409">Pengukuran Kinerja</td> <td data-bbox="716 1346 873 1409">6</td> <td data-bbox="873 1346 1031 1409">9</td> <td data-bbox="1031 1346 1182 1409">15</td> <td data-bbox="1182 1346 1323 1409">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1409 716 1472">Pelaporan Kinerja</td> <td data-bbox="716 1409 873 1472">3</td> <td data-bbox="873 1409 1031 1472">4,5</td> <td data-bbox="1031 1409 1182 1472">7,5</td> <td data-bbox="1182 1409 1323 1472">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1472 716 1535">Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td data-bbox="716 1472 873 1535">5</td> <td data-bbox="873 1472 1031 1535">7,5</td> <td data-bbox="1031 1472 1182 1535">12,5</td> <td data-bbox="1182 1472 1323 1535">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1535 716 1568">Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td data-bbox="716 1535 873 1568">20</td> <td data-bbox="873 1535 1031 1568">30</td> <td data-bbox="1031 1535 1182 1568">50</td> <td data-bbox="1182 1535 1323 1568">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:</p> | Komponen | Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% | Sub-Komponen 2 Kualitas 30% | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50% | Total Bobot | Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Komponen | Sub-Komponen 1 Keberadaan 20% | Sub-Komponen 2 Kualitas 30% | Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50% | Total Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengukuran Kinerja | 6 | 9 | 15 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaporan Kinerja | 3 | 4,5 | 7,5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 5 | 7,5 | 12,5 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 20 | 30 | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|----------|----|-----|---|---|----|--|----|----|---|---|----|---|----|----|--|---|----|--|---|----|--|---|---|---|-----------------|-------|----------|----|-----|---|---|----|--|----|----|---|---|----|---|----|----|--|---|----|--|---|----|--|---|---|---|--|
| | | <p>a. Keberadaan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pilihan Jawaban</th> <th>Bobot</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>100</td> <td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>90</td> <td>Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>80</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>70</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>60</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50</td> <td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30</td> <td>Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Kualitas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pilihan Jawaban</th> <th>Bobot</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>100</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>90</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>80</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>70</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>60</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50</td> <td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30</td> <td>Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja</td> </tr> </tbody> </table> | Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | AA | 100 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. | A | 90 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir | BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | AA | 100 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional | A | 90 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut | BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | |
| Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | 100 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 90 | Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | 100 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 90 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------|----------|----|-----|---|---|----|--|----|----|---|---|----|---|----|----|--|---|----|--|---|----|--|---|---|---|----------|-------|--------------|----|---------|--|---|--------|--|----|--------|---|---|--------|--|--|
| | | <p>c. Pemanfaatan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pilihan Jawaban</th> <th>Bobot</th> <th>Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>100</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>90</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>80</td> <td>Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>70</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>60</td> <td>Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>50</td> <td>Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30</td> <td>Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>0</td> <td>Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai akhir akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Predikat</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada</td> </tr> </tbody> </table> | Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | AA | 100 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional | A | 90 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut | BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | Predikat | Nilai | Interpretasi | AA | >90-100 | Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. | A | >80-90 | Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. | BB | >70-80 | Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. | B | >60-70 | Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada | |
| Pilihan Jawaban | Bobot | Kriteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | 100 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 90 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | 80 | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 70 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 60 | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 50 | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 30 | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat | Nilai | Interpretasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AA | >90-100 | Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | >80-90 | Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BB | >70-80 | Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | >60-70 | Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|-----|---|---|-------------|
| | | <p>unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p> <p>CC >50-60 Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p> <p>C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p> <p>D >0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p> | |
| 11. | <p>Nilai Kinerja Anggaran:</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</p> | <p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan</p> | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|------------|----------------|-------------|----|--|--------------------------|----|--|--|
| | | <p>anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p> <p>Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran=[50%×Nilai EKA]+[50%×Nilai IKPA]</p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.</p> <p>Penilaian EKA terdiri dari capaian atas komponen-komponen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyerapan Anggaran Konsistensi Capaian Output/Keluaran Efisiensi Nilai Efisiensi <p>Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p> <p>Penilaian IKPA terdiri atas indikator-indikator dengan bobot penilaian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA dengan bobot penilaian 10%; Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot penilaian 15%; Penyerapan Anggaran dengan bobot penilaian 20%; Belanja Kontraktual dengan bobot penilaian 10%; Penyelesaian Tagihan dengan bobot penilaian 10%; Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot penilaian 10%; Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA) Capaian Output dengan bobot penilaian 25%. <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> | | | | | | | | | | |
| 12. | <p>Zona Integritas:</p> <p>Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75</p> | <p>Zona Integritas (ZI):</p> <p>Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="516 1682 1068 1864"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Syarat | Menuju WBK | Komponen Nilai | Nilai Total | 75 | | Nilai Minimal Pengungkit | 40 | | |
| Syarat | Menuju WBK | Komponen Nilai | | | | | | | | | | |
| Nilai Total | 75 | | | | | | | | | | | |
| Nilai Minimal Pengungkit | 40 | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | | | Sumber Data | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|---|-------------|-----------|-------|------------------------|----|--------------------------|----|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------------------|-----|--|-----|
| | | Bobot nilai minimal per area pengungkit | 60% | Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal | 18,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal | 15,75 (survey 3,60) | Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal | 14,00 (survey 3,20) | Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Manajemen Perubahan</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>2. Penataan Tata Laksana</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5. Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Penilaian | Bobot | 1. Manajemen Perubahan | 8% | 2. Penataan Tata Laksana | 7% | 3. Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | 5. Penguatan Pengawasan | 15% | 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |
| Penilaian | Bobot | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Manajemen Perubahan | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Penataan Tata Laksana | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Penataan Sistem Manajemen SDM | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Penguatan Pengawasan | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasingmasing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Definisi, Kriteria, dan Formula | Sumber Data |
|----|-------------------|--|-------------|
| | | <p>Formula:</p> <p>Target IKU= (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)</p> <p>Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform</p> <p>Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Tipe Perhitungan : Nonkumulatif</p> | |



Hubungi Kami

Politeknik Negeri Madura,

Jl. Raya Camplong KM. 4 Taddan, Kec. Camplong, Kab. Sampang

Madura, 69281



www.poltera.ac.id



sekretariat@poltera.ac.id



[poltera_jaya](#)



[politekniknegerimadura](#)



[+6281360034040](tel:+6281360034040)

